



**OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN  
KEUANGAN  
( AUDITED )  
2016**

---

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Singkatan	vii
Pernyataan Telah di Reviu	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Kebijakan Teknis Ombudsman RI	9
A.3. Pendapatan Ombudsman RI	9
A.4. Belanja Ombudsman RI	10
A.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.6. Kebijakan Akuntansi	13
A.7. Basis Akuntansi	23
A.8. Dasar Pengukuran	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja Negara	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
C.1. Aset Lancar	31
C.2. Aset Tetap	32
C.3. Aset Lainnya	36
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	38
C.5. Ekuitas	39
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	40
D.1.2. Beban Operasional	40

D.1.2.1 Beban Pegawai	41
D.1.2.2 Beban Persediaan	41
D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa	42
D.1.2.4. Beban Pemeliharaan	42
D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas	43
D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi	44
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
E.1. Ekuitas Awal	46
E.2. Surplus (Defisit) LO	46
E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas	46
E.4. Transaksi Antar Entitas	47
E.5. Ekuitas Akhir	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49

**DAFTAR TABEL**

		Halaman
TABEL 1	Ringkasan LRA 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	1
TABEL 2	Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	2
TABEL 3	Perbandingan Pendapatan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	10
TABEL 4	Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	10
TABEL 5	Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih	21
TABEL 6	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	22
TABEL 7	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2016	24
TABEL 8	Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	24
TABEL 9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2016	25
TABEL 10	Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	26
TABEL 11	Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	26
TABEL 12	Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	28
TABEL 13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	29
TABEL 14	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	30
TABEL 15	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	30
TABEL 16	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2016	31
TABEL 17	Rincian Belanja Dibayar Di Muka 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	32
TABEL 18	Rincian Persediaan	32
TABEL 19	Rincian Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	33
TABEL 20	Nilai Tanah 31 Desember Tahun 2016	33
TABEL 21	Mutasi Peralatan dan Mesin 31 Desember 2016	34

TABEL 22	Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2016	35
TABEL 23	Mutasi Aset Tetap Lainnya	35
TABEL 24	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36
TABEL 25	Rincian Aset Lainnya	36
TABEL 26	Rincian Aset tak Berwujud	37
TABEL 27	Aset Lain-lain	37
TABEL 28	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	38
TABEL 29	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	38
TABEL 30	Rincian Beban Operasional 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	40
TABEL 31	Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	41
TABEL 32	Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2016	41
TABEL 33	Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	42
TABEL 34	Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	43
TABEL 35	Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	43
TABEL 36	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	44
TABEL 37	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2016	45
TABEL 38	Rincian Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	46
TABEL 39	Rincian Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	47

## **DAFTAR GRAFIK**

	Halaman
GRAFIK 1 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2015	11
GRAFIK 2 Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2016	25



## KATA PENGANTAR

Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu entitas Pengguna Anggaran/Barang sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Pemerintah yang sehat. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 25 April 2017

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal



A. Anmaharsi  
NIP 19590729 198012 2 001

## **DAFTAR SINGKATAN**

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
RI	: Republik Indonesia
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan





## **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

### **PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2016 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Ombudsman Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan terkait lainnya.

Jakarta, 21 April 2017

Plt. Kabag Pengawasan Internal



Timotius Tarigan  
NIP. 19650526 198603 1 001



## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

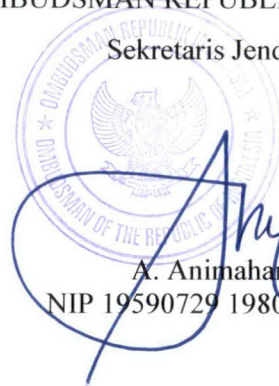
Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 25 April 2017

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal



A. Animaharsi

NIP 19590729 198012 2 001

13

## I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2016 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.525.805.027,00

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp126.143.918.276 atau 74,18% dari anggaran dalam DIPA sebesar Rp170.056.252.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disajikan sebagai berikut:

**TABEL 1**

Ringkasan LRA 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2016		Tahun Anggaran 2015	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	2.525.805.027	0	265.899.133
Belanja Rupiah Murni	170.056.252.000	126.143.918.276	135.986.845.000	88.951.681.409

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2016 adalah Rp27.696.473.536,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp4.155.609.961,00 dan Aset Tetap sebesar Rp23.093.509.152,00 serta Aset lainnya sebesar Rp447.354.423,00

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2016 adalah Rp2.004.273.670,00 Sedangkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2016 adalah Rp25.692.199.866,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disajikan sebagai berikut:

**TABEL 2**  
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Tanggal Neraca		Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
	31-12-2016	31-12-2015	
<b>Aset</b>			
Aset Lancar	4.155.609.961	5.023.163.513	(867.553.552)
Aset Tetap	23.093.509.152	18.594.365.127	4.499.144.025
Aset Lainnya	447.354.423	604.355.011	(157.000.588)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>27.696.473.536</b>	<b>24.221.883.651</b>	<b>3.474.589.885</b>
<b>Kewajiban</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	2.004.273.670	10.573.534.555	(8.569.260.885)
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	25.692.199.866	13.648.349.096	12.043.850.770
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>27.696.473.536</b>	<b>24.221.883.651</b>	<b>3.474.589.885</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban operasional sebesar Rp113.776.307.078,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(Rp113.776.307.078,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2.259.191.083,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(111.517.115.995,00).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp13.648.349.096,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(111.517.115.995,00) ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar minus Rp57.146.484,00 dan transaksi antar entitas senilai Rp123.618.113.249,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp25.692.199.866,00.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sedangkan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

**II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2016		% TASE	31 DES 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>				
➤ Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	2.525.805.027	0,00	265.899.133
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>-</b>	<b>2.525.805.027</b>	<b>0,00</b>	<b>265.899.133</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
➤ Belanja Pegawai		43.684.173.000	36.406.259.320	83,34	28.182.048.995
➤ Belanja Barang		111.321.685.000	76.659.686.922	68,86	60.255.348.603
➤ Belanja Modal		15.050.394.000	13.077.972.034	86,89	514.283.811
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>170.056.252,000</b>	<b>126.143.918.276</b>	<b>74,18</b>	<b>88.951.681.409</b>
➤ <b>Belanja Pegawai</b>	<b>B.2.1</b>	43.684.173.000	36.406.259.320	83,34	28.182.048.995
➤ <b>Belanja Barang</b>	<b>B.2.2</b>	111.321.685.000	76.659.686.922	68,86	60.255.348.603
➤ <b>Belanja Modal</b>	<b>B.2.3</b>	15.050.394.000	13.077.972.034	86,89	514.283.811

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

**III. NERACA**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2016	31 DES 2015
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>		
➤ Kas di Bendahara Pengeluaran	<b>C.1.1</b>	8.874.678	510.620
➤ Kas Lainnya dan Setara Kas	<b>C.1.2</b>	621.065.134	3.196.569.782
➤ Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	<b>C.1.3</b>	2.883.605.758	1.537.174.624
➤ Piutang Bukan Pajak	<b>C.1.4</b>	97.647.995	0
➤ Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(488.240)	0
➤ <i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>		97.159.755	0
➤ Persediaan	<b>C.1.5</b>	544.904.636	288.908.487
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>4.155.609.961</b>	<b>5.023.163.513</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>		
➤ Tanah	<b>C.2.1</b>	7.315.400.000	7.315.400.000
➤ Peralatan dan Mesin	<b>C.2.2</b>	35.608.495.801	27.588.772.634
➤ Gedung dan Bangunan	<b>C.2.3</b>	0	118.554.989
➤ Aset Tetap Lainnya	<b>C.2.4</b>	2.052.544.413	1.175.083.695
➤ Akumulasi Penyusutan	<b>C.2.5</b>	(21.882.931.062)	(17.603.446.191)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>23.093.509.152</b>	<b>18.594.365.127</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.3</b>		
➤ Aset Tak Berwujud	<b>C.3.1</b>	467.059.234	261.834.234
➤ Aset Lain-lain	<b>C.3.2</b>	1.256.377.439	709.926.595
➤ Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	<b>C.3.3</b>	(1.276.082.250)	(367.405.818)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>447.354.423</b>	<b>604.355.011</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>27.696.473.536</b>	<b>24.221.883.651</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.4</b>		
➤ Utang Kepada Pihak Ketiga	<b>C.4.1</b>	1.374.333.858	7.400.845.153
➤ Uang Muka dari KPPN	<b>C.4.2</b>	8.874.678	510.620
➤ Utang Jangka Pendek Lainnya	<b>C.4.2</b>	621.065.134	3.172.178.782
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>2.004.273.670</b>	<b>10.573.534.555</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>2.004.273.670</b>	<b>10.573.534.555</b>
<b>EKUITAS</b>			
➤ Ekuitas	<b>C.5</b>	25.692.199.866	13.648.349.096
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>25.692.199.866</b>	<b>13.648.349.096</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>27.696.473.536</b>	<b>24.221.883.651</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



## IV. LAPORAN OPERASIONAL

### OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1</b>		
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
➤ Pendapatan Negara Bukan Pajak	<b>D.1.1</b>	0	868.800
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1.1</b>	<b>0</b>	<b>868.800</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1.2</b>		
➤ Beban Pegawai	<b>D.1..2.1</b>	36.308.611.325	28.182.048.995
➤ Beban Persediaan	<b>D.1..2.2</b>	1.315.993.171	1.256.324.432
➤ Beban Barang dan Jasa	<b>D.1..2.3</b>	33.335.005.749	25.533.870.710
➤ Beban Pemeliharaan	<b>D.1..2.4</b>	4.289.176.371	2.960.637.819
➤ Beban Perjalanan Dinas	<b>D.1..2.5</b>	33.375.939.340	33.889.913.695
➤ Beban Penyusutan dan Amortisasi	<b>D.1..2.6</b>	5.151.092.882	4.381.174.477
➤ Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	<b>D.1..2.7</b>	488.240	0
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1.2</b>	<b>113.776.307.078</b>	<b>96.203.970.128</b>
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1-D.1.2)</b>	<b>D.1</b>	<b>(113.776.307.078)</b>	<b>(96.203.101.328)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.2</b>		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	<b>D.2.1</b>	(11.390.068)	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	<b>D.2.2</b>	2.270.581.151	0
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)</b>	<b>D.2</b>	<b>2.259.191.083</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO (D.1+D.2)</b>		<b>(111.517.115.995)</b>	<b>(96.203.101.328)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

## V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2016	31 DES 2015
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>E.1</b>	<b>13.648.349.096</b>	<b>21.342.977.889</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>E.2</b>	<b>(111.517.115.995)</b>	<b>(96.203.101.328)</b>
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI NILAI EKUITAS</b>	<b>E.3</b>		
➤ Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	(85.013.196)
➤ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	(57.164.484)	-
<b>Jumlah Koreksi</b>	<b>E.3</b>	<b>(57.146.484)</b>	<b>(85.013.196)</b>
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>E.4</b>		
➤ Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	126.143.918.276	88.951.681.409
➤ Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(2.525.805.027)	(265.899.133)
➤ Transfer Keluar	E.4.3	-	(92.296.545)
<b>Jumlah Transaksi Antar Entitas</b>	<b>E.4</b>	<b>123.618.113.249</b>	<b>88.593.485.731</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>(E2+E3+E4)</b>	<b>12.043.850.770</b>	<b>(7.694.628.793)</b>
<b>EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)</b>	<b>E.5</b>	<b>25.692.199.866</b>	<b>13.648.349.096</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

## **VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **A. PENJELASAN UMUM**

#### *Dasar Hukum*

#### **A.1. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standard Reviu atas Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat.

#### *Rencana Strategis*

#### **A.2. KEBIJAKAN TEKNIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA STRATEGIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Sesuai dengan Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia tahun 2015 – 2019, visi Ombudsman Republik Indonesia adalah “Menjadi Pengawas Pelayanan Publik Yang

Responsif, Kredibel, dan Berkeadilan”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang bebas maladministrasi.
2. Meningkatkan efektivitas penyelesaian laporan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI.
4. Meningkatkan dukungan manajemen.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan strategis Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang bebas maladministrasi.
2. Meningkatnya efektivitas penyelesaian laporan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Ombudsman RI.
4. Meningkatnya dukungan manajemen.

#### *Pendapatan*

### **A.3. PENDAPATAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Ombudsman Republik Indonesia tidak mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Di dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 Ombudsman Republik Indonesia tidak mencatumkan estimasi pendapatan.

Realisasi PNBP Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.525.805.027,00 yang terdiri atas Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu.

Dibandingkan dengan 31 Desember 2015 dengan realisasi terdiri atas PNBP berupa Penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL sebesar Rp265.899.133,00.

Perbandingan realisasi pendapatan Negara dan Hibah Ombudsman Republik Indonesia 31 Desember Tahun Anggaran 2016 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2015 disajikan sebagai berikut :

**TABEL 3**  
**PERBANDINGAN PENDAPATAN**  
**31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015**

No.	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI PNBP		KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		2016	2015	
1.	Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu	2.525.805.027	265.899.133	2.259.905.894
2.	Pendapatan lain-lain	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.525.805.027</b>	<b>265.899.133</b>	<b>2.259.905.894</b>

*Belanja*

**A.4. BELANJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp126.143.918.276,00 atau 74,18% dari anggaran sebesar Rp170.056.252.000,00 yang keseluruhannya bersumber dari belanja rupiah murni. Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

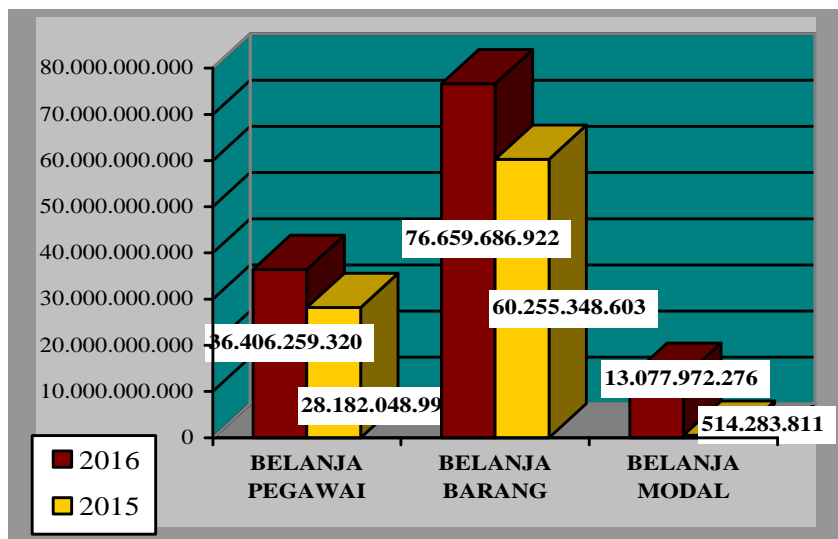
Rincian realisasi belanja Anggaran 31 Desember Tahun Anggaran 2016 dibandingkan dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2015 disajikan sebagai berikut :

**TABEL 4**  
**PERBANDINGAN REALISASI BELANJA**  
**31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA		KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		2016	2015	
51	Belanja Pegawai	36.406.259.320	28.182.048.995	8.224.210.325
52	Belanja Barang	76.659.686.922	60.255.348.603	16.404.338.319
53	Belanja Modal	13.077.972.034	514.283.811	12.563.688.223
	<b>JUMLAH</b>	<b>126.143.918.276</b>	<b>88.951.681.409</b>	<b>37.192.236.867</b>

Komposisi Realisasi Belanja Ombudsman Republik Indonesia  
31 Desember 2016 dan 2015 di sajikan pada grafik berikut ini:

**GRAFIK 1.**  
**PERBANDINGAN REALISASI BELANJA**  
**31 DESEMBER 2016 dan 2015**



*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan Keuangan*

#### **A.5. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan 31 Desember 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan

dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Realisasi APBN terdiri atas Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi Ombudsman Republik Indonesia dan disusun berdasarkan SAI.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode laporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

6. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.



*Kebijakan  
Akuntansi*

## **A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember Tahun 2016 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia adalah:

*Pendapatan-  
LRA*

### **(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Ombudsman Republik Indonesia berasal dari Kegiatan Non-operasional yaitu dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara (KUN) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

*Beban*

**(4) Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

### **(5) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

#### *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri atas kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan dalam neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat

keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

#### *Investasi*

#### **b. Investasi**

Investasi adalah aset untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

##### **1) Investasi Non Permanen**

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara

tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi :

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/ BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/ Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

## 2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan Modal Negara (PMN) pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51% disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Hukum Milik Negara (BUMN/ BHMN). Penyertaan Modal

Negara (PMN) pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51% (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Penyertaan Modal Negara (PMN) dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode equitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

#### *Aset Tetap*

#### **c. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan, yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/ daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.



*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang	10
Hak Ekonomis Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih*

**(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

**GRAFIK 2.**

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Penyusutan Aset  
Tetap*

**(9) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap**

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2014, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 6

**TABEL 6**

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Informasi  
Pendapatan dan  
Belanja Akrua*

**(10) Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat, satuan kerja pada kementerian/ lembaga selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrua berdasarkan data akrua pada tanggal pelaporan. Informasi pendapatan dan belanja secara akrua merupakan suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa pengguna Anggaran (UAKPA) Tahunan.

Informasi pendapatan secara akrua diperoleh dari realisasi pendapatan berbasis kas dan disesuaikan dengan transaksi pendapatan akrua, sedangkan belanja secara akrua diperoleh dari realisasi belanja berbasis kas disesuaikan dengan transaksi belanja akrua.

Transaksi pendapatan secara akrua terdiri atas :

- a. Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai penambahan pada informasi pendapatan secara akrua dan sebagai piutang pada neraca.
- b. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrua dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.

Transaksi belanja secara akrua terdiri atas :

- a. Belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrua dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.
- b. Belanja dibayar dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrua dan sebagai piutang pada neraca.

*Basis Akuntansi*

**A.7. BASIS AKUNTANSI**

Ombudsman RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realiasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

**A.8. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Ombudsman RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan Hibah  
Rp 2.525.805.027*

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah Rp2.525.805.027,00 yang merupakan sisa anggaran tahun yang lalu.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 7 berikut ini:

**TABEL 7.**

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember TA 2016

URAIAN	2016		
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	-	2.525.805.027	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2.525.805.027</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBPN pada 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 849,91 persen dari realisasi pendapatan PNBPN 31 Desember Tahun Anggaran 2015.

**TABEL 8.**

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

URAIAN	REALISASI 31-12-2016	REALISASI 31-12-2015	% Naik (Turun)
1. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	2.525.805.027	265.899.133	849,91
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.525.805.027</b>	<b>265.899.133</b>	<b>849,91</b>

Pendapatan pada Ombudsman RI merupakan penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu serta temuan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya yang telah di setorkan ke Kas Negara selama tahun 2016. Daftar rincian PNBPN Tahun 2016 (lihat lampiran pendukung).



Realisasi Belanja  
Negara  
Rp 126.143.918.276

## B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Ombudsman Republik Indonesia pada 31 Desember Tahun Anggaran 2016 adalah Rp126.143.918.276,00 atau 74,18% dari anggaran senilai Rp170.056.252.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2016 disajikan pada Tabel Berikut:

**TABEL 9.**

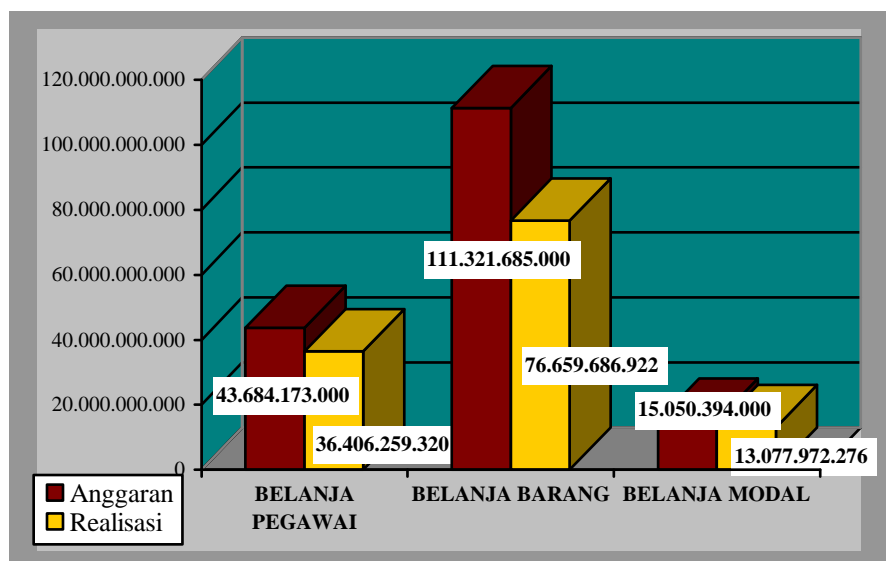
Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	43.684.173.000	36.406.259.320	83,34
Belanja Barang	111.321.685.000	76.659.686.922	68,86
Belanja Modal	15.050.394.000	13.077.972.034	86,89
<b>Total Belanja</b>	<b>170.056.252.000</b>	<b>126.143.918.276</b>	<b>74,18</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja 31 Desember TA 2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**GRAFIK 2.**

Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2016



Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar 41,81 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember Tahun Anggaran 2015.

Kenaikan Realisasi Belanja disebabkan oleh:

1. Penambahan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka mendukung rencana kerja strategis.
2. Penambahan kegiatan substansi sesuai dengan RPJMN 2015-2019.

**TABEL 10.**

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2016	REALISASI 31 Desember 2015	% Naik(Turun)
Belanja Pegawai	36.406.259.320	28.182.048.995	<b>29,18</b>
Belanja Barang	76.659.686.922	60.255.348.603	<b>27,22</b>
Belanja Modal	13.077.972.034	514.283.811	<b>2.442,95</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>126.143.918.276</b>	<b>88.951.681.409</b>	<b>41,81</b>

*Belanja Pegawai*  
*Rp36.406.259.320*

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Ombudsman Republik Indonesia pada 31 Desember Tahun Anggaran 2016 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; dan Belanja Honorarium.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2016 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2015 masing-masing sebesar Rp36.406.259.320,00 dan Rp28.182.048.995,00 dan terdapat pengembalian belanja pegawai atas pembulatan gaji PNS sebesar Rp3.500.454, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**TABEL 11.**

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2016	REALISASI 31 Desember 2015	% (Naik/ Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.568.340.752	5.920.258.943	<b>9,86</b>
Belanja Honorarium	11.162.945.040	7.817.994.566	<b>29,96</b>
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	18.678.473.982	14.443.808.852	<b>23,04</b>
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>36.409.759.774</b>	<b>28.182.062.361</b>	<b>22,59</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(3.500.454)	(13.366)	<b>(99,61)</b>
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>36.406.259.320</b>	<b>28.182.048.995</b>	<b>22,59</b>

Berdasarkan Tabel tersebut realisasi belanja pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar 22,59% dari realisasi belanja pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2015.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan status kepegawaian dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 76 orang pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
2. Adanya kenaikan status kepegawaian dari Calon Asisten (CA) menjadi Asisten Pratama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
3. Pendidikan dan Pelatihan bagi Insan Ombudsman RI.
4. Kenaikan besaran Insentif bagi Asisten Ombudsman RI.
5. Kenaikan Penghasilan Ketua dan Anggota Ombudsman RI.

Belanja Barang  
Rp76.659.686.922

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2016 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2015 masing-masing sebesar Rp 76.659.686.922,00 dan Rp 60.255.348.603,00.

Terdapat pengembalian sisa perjalanan dinas sebesar Rp2.893.528.382,00

Berdasarkan Tabel 12 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2016 mengalami kenaikan 27,22% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia.

**TABEL 12.**  
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2016	REALISASI 31 Desember 2015	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	6.510.270.451	4.482.926.740	45,22
Belanja barang persediaan	2.900.329.751	799.749.175	262,65
Belanja Barang Non Operasional	10.780.248.339	5.296.272.839	103,54
Belanja Jasa	18.422.554.038	13.278.364.218	38,74
Belanja Pemeliharaan	4.790.809.103	2.508.121.936	91,01
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	35.415.834.416	34.170.590.153	3,64
Belanja Perjalanan Luar Negeri	733.169.206	592.257.877	23,79
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>79.553.215.304</b>	<b>61.128.282.938</b>	<b>30,14</b>
Pengembalian Belanja	(2.893.528.382)	(872.834.335)	231,51
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>76.659.686.922</b>	<b>60.255.448.603</b>	<b>27,22</b>

**B.2.3. Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp13.077.972.034,00 dan Rp514.283.811,00.

Realisasi Belanja Modal 31 Desember Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan pesat sebesar 2.442,94% dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember Tahun Anggaran 2015.

Kenaikan ini disebabkan:

1. Pembenahan Ruang Kerja Kantor Pusat Ombudsman RI.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Kantor Pusat.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Kantor Perwakilan.
4. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat).

**TABEL 13.**

Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

JENIS BELANJA	REALISASI 31-12-2016	REALISASI 31-12-2015	%(NAIK /TURUN)
Kendaraan Bermotor	-	206.802.961	(100)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.820.847.034	307.480.850	4.069,64
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	257.225.000	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>13.078.072.034</b>	<b>514,283,811</b>	<b>2.442,96</b>
Pengembalian Belanja Modal	(100.000)	(100.000)	-
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>13.077.972.034</b>	<b>514,183,811</b>	<b>2.442,94</b>

Pengembalian Belanja Modal sebesar Rp100.000,00 adalah merupakan kelebihan penyetoran ke Kas Umum Negara melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dengan menggunakan akun Belanja Modal.

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar  
Rp4.155.609.961

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp4.155.609.961,00 dan Rp5.023.163.513,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut

**TABEL 14.**

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

NO	ASET LANCAR	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.874.678	510.620
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	621.065.134	3.196.569.782
3	Belanja Dibayar di Muka	2.883.605.758	1.537.174.624
4	Piutang Bukan Pajak	97.647.995	0
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(488.240)	0
6	Piutang Bukan Pajak (Netto)	97.159.755	0
7	Persediaan	544.904.636	288.908.487
	<b>Jumlah</b>	<b>4.155.609.961</b>	<b>5.023.163.513</b>

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp8.874.678

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp8.874.678,00 dan Rp510.620,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel berikut :

**TABEL 15.**

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

NO	JENIS	31 Desember 2016
1	Sisa UP	2.952.192
2	Sisa TUP	5.922.486
	<b>Jumlah</b>	<b>8.874.678</b>

Sisa UP sebesar Rp2.952.192,00 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 21 Januari 2017 dengan NTPN C91D38B1CBL8PVUP dan Sisa TUP sebesar Rp5.922.486,00 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 21 Januari 2017 dengan NTPN 67D478B0EV0TO2UP .

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp621.065.134*

### C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa selain UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Ombudsman Republik Indonesia memiliki Kas Lainnya dan Setara Kas bersumber dari Pungutan Pajak dan sisa uang LS Perjalanan Dinas yang belum disetor per tanggal neraca.

Realisasi Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp.621.065.134,00 dan Rp3.196.569.782,00. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini:

**TABEL 16.**

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2016

NO	JENIS	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
1	Pungutan Pajak Yang Belum Disetor	4.193.158	70.125.879
2	Sisa LS Perjalanan Dinas yang Belum Disetor	616.613.176	2.239.686.496
3	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Yang Belum di Bayar Kepada Travel	-	862.366.407
4	Setoran Sisa Uang Persediaan ke Kas Negara yang Belum Dilaporkan	-	7.340.000
5	Setoran Sisa Uang Persediaan ke Kas Negara yang Belum Dilaporkan	-	17.051.000
6	Uang lain-lain	258.800	-
<b>Jumlah</b>		<b>621.065.134</b>	<b>3.196.569.782</b>

Sisa Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp621.065.134 telah disetorkan ke Kas Umum Negara (KUN) dengan rincian (lihat lampiran pendukung).

Belanja Dibayar  
Dimuka  
Rp2.883.605.758

### C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah Rp2.883.605.758,00 dan Rp1.537.174.624,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang/jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka disajikan dalam tabel berikut :

**TABEL 17.**

Rincian Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*) 31 Desember 2016 dan 2015

NO	JENIS	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
1	Pembayaran Sewa Kendaraan	1.617.424.244	918.832.777
2	Pembayaran Sewa Gedung Kantor	1.266.181.514	618.341.847
Jumlah		<b>2.883.605.758</b>	<b>1.537.174.624</b>

Piutang Bukan  
Pajak  
Rp97.647.995

### C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp97.647.995,00 yang merupakan kelebihan pembayaran Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ombudsman RI, masing-masing sebesar Rp.76.583.400,00 dan Rp21.064.595,00. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut:

**TABEL 18.**

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016

NO	JENIS	31 DESEMBER 2016
1	Piutang atas Kelebihan Pembayaran Uang Makan	76.583.400
2	Piutang atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja	21.064.595
<b>Piutang Bukan Pajak</b>		<b>97.647.995</b>
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak		(488.240)
<b>Piutang Bukan Pajak (Netto)</b>		<b>97.159.755</b>



Persediaan  
Rp544.904.636

### C.1.5. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah Rp544.904.636,00 dan Rp288.908.487,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disajikan pada tabel berikut:

**TABEL 19.**  
Rincian Persediaan

URAIAN	JUMLAH
Saldo Awal 01/01/2016	288,908,487
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Belanja TA 2016	2,900,329,751
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	80,599,987
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Beban Persediaan TA 2016	1,329,879,101
Kesalahan Menggunakan Akun 521811	676,252,950
Beban Penyesuaian Nilai Aset	335,823,863
Kesalahan Menggunakan Akun 521811 untuk Pembelian Snack	382,977,675
<b>Saldo Akhir 31/12/2016</b>	<b>544,904,636</b>

Aset Tetap  
Rp23.093.509.152

### C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing tersaji sebesar Rp23093.509.152,00 dan Rp18.594.365.127,00 Aset Tetap yang disajikan merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disajikan pada tabel berikut:

**TABEL 20.**  
Rincian Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

NO	JENIS	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
1	Tanah	7.315.400.000	7.315.400.000
2	Peralatan dan Mesin	35.608.495.801	27.588.772.634
3	Gedung dan Bangunan	-	118.554.989
4	Aset Tetap Lainnya	2.052.544.413	1.175.083.695
<b>Jumlah</b>		<b>44.976.440.214</b>	<b>36.197.811.318</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(21.882.931.062)	(17.603.446.191)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>23.093.509.152</b>	<b>18.594.365.127</b>

Tanah  
Rp7.315.400.000

### C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia merupakan transfer dari BPKP Perwakilan DI Yogyakarta seluas 895 m<sup>2</sup> dan Sumatera Barat 2.188 m<sup>2</sup> untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST-350/SU/05/2014 Tanggal 24 Februari 2014. Nilai tanah keseluruhan yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia sebesar Rp 7.315.400.000,00. Tanah tersebut sudah memiliki gambar gedung (blue print) tetapi belum di bangun karena keterbatasan kesediaan anggaran Ombudsman Republik Indonesia. Nilai tanah per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini:

**TABEL 21.**

Nilai Tanah 31 Desember Tahun 2016

NO	PERWAKILAN	31 Desember 2015
1	DI Yogyakarta	4.689.800.000
2	Sumatera Barat	2.625.600.000
Jumlah		<b>7.315.400.000</b>

Peralatan dan  
MesinRp35.5608.  
495.801

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp35.608.495.801,00 dan Rp27.588.772.634,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp21.882.931.062,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp13.725.564.739,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**TABEL 22.**

Mutasi Peralatan dan Mesin 31 Desember Tahun 2016

URAIAN	JUMLAH
Nilai Perolehan per 31 Des 2015	<b>27.588.772.634</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	12.566.747.293
<b>Mutasi kurang:</b>	
Penghentian aset dari penggunaan	(4.547.027.126)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>35.608.495.801</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(21.882.931.062)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>13.725.564.739</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa penambahan dari pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp12.566.747.293,00 dan pengurangan sebesar minus Rp4.547.027.126,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan.

*Gedung dan  
Bangunan Rp0*

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia merupakan aset untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di DI Yogyakarta dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Gedung dan bangunan tersebut diperoleh transfer dari BPKP Perwakilan DI Yogyakarta dengan nilai Rp118.554.989,00.

Gedung dan Bangunan yang dimiliki tersebut sudah tidak layak digunakan dan harus dilakukan penghapusbukuan. Sebelum dilakukan penghapusbukuan harus dilakukan penilaian aset oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Sleman. Pada Tahun 2016 sudah dilakukan perubahan kondisi menjadi rusak berat sehingga nilai pada Neraca atas Gedung dan Bangunan tersebut menjadi nihil.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**TABEL 23.**  
Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2016

URAIAN	JUMLAH
<b>Saldo Awal 01 Januari 2016</b>	<b>118.554.989</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
Penghentian aset dari penggunaan	(118.554.989)
Penghapusan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>-</b>

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp2.052.544.413*

#### C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp2.052.544.413,00 dan Rp1.175.083.695,00.

Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 24.**  
Mutasi Aset Tetap Lainnya

URAIAN	JUMLAH
Saldo per 01 Januari 2016	1.175.083.695
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	805.697.728
Koreksi Nilai	71.762.990
<b>Mutasi kurang:</b>	
Koreksi nilai	-
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>2.052.544.413</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>2.052.544.413</b>

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp(21.882.931.062)*

#### C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah Rp(21.882.931.062,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 25.**  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	7.315.400.000	-	7.315.400.000
2	Peralatan dan Mesin	35.608.495.801	21.882.931.062	13.725.564.739
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	2.052.544.413	-	2.052.544.413
<b>Jumlah</b>		<b>44.976.440.214</b>	<b>21.882.931.062</b>	<b>23.093.509.152</b>

*Aset Lainnya*  
Rp447.354.423

### C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp447.354.423,00 dan Rp604.355.011,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut:

**TABEL 26.**  
Rincian Aset Lainnya

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
1	Aset Tak Berwujud	467.059.234	261.834.234
2	Aset Lain-lain	1.256.377.439	709.926.595
<b>Jumlah</b>		<b>1.723.436.673</b>	<b>971.760.829</b>
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(1.276.082.250)	(367.405.818)
<b>Nilai Buku per 31 DESEMBER 2016</b>		<b>447.354.423</b>	<b>604.355.011</b>

*Aset Tak Berwujud*  
Rp467.059.234

#### C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp467.059.234,00 dan Rp261.834.234,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Ombudsman Republik Indonesia berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut:

**TABEL 27.**  
Rincian Aset tak Berwujud

NO.	URAIAN	NILAI
Saldo 31 Desember 2015		261.834.234
1	Pembelian Software	205.225.000
<b>Jumlah 31 Desember 2016</b>		<b>467.059.234</b>

Terdapat penambahan nilai terhadap Aset Tak Berwujud berupa Software sebesar Rp205.225.000,00 sampai dengan 31 Desember 2016.

*Aset Lain-Lain*  
Rp1.256.377.439

### C.3.2. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp1.256.377.439,00 dan Rp709.926.595,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Ombudsman Republik Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain sebagai berikut:

**TABEL 28.**  
Rincian Aset Lain-lain

<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2015</b>	<b>709.926.595</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Reklasifikasi dari aset tetap	547.898.490
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	1.447.646
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>1.256.377.439</b>

Terdapat penambahan nilai terhadap Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2016 akibat reklasifikasi dari aset tetap dan pengurangan akibat penghapusan BMN.

*Akumulasi  
Penyusutan/Amortisasi  
Aset Lainnya*  
Rp(1.276.082.250)

### C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah Rp(1.276.082.250,00). Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian/pengamortisian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 29.**  
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Aset Tak Berwujud	467.059.234	187.013.896	280.045.338
2	Aset Lain-Lain	1.256.377.439	1.089.068.354	167.309.085
<b>Jumlah</b>		<b>1.723.436.673</b>	<b>1.276.082.250</b>	<b>447.354.423</b>

Kewajiban Jangka  
Pendek  
Rp2.004.273.670

#### C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp2.004.273.670,00 dan Rp10.573.534.555,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 30.**

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Nilai
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	1.374.333.858
2	Uang Muka dari KPPN	8.874.678
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	621.065.134
<b>Jumlah</b>		<b>2.004.273.670</b>

Utang Kepada  
Pihak Ketiga  
Rp1.374.333.858

##### C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Ombudsman RI per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.374.333.858,00 dan Rp7.400.845.153,00. Utang Kepada Pihak Ketiga adalah Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Terdapatnya Utang Kepada Pihak Ketiga Ombudsman Republik Indonesia adalah akibat belum terbayarkannya tagihan-tagihan yang sudah selesai pekerjaannya sampai dengan tanggal neraca, disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 31.**

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2015</b>	<b>7.400.845.153</b>
<b>Pengurangan:</b>	
Pembayaran Utang Tahun 2015	(7.062.465.153)
Koreksi Tagihan Utang Tahun 2015	(82.710.000)
<b>Sisa Utang Tahun 2015</b>	<b>255.670.000</b>
<b>Penambahan:</b>	
Utang Tahun 2016	1.118.663.858
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>1.374.333.858</b>

Total Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.374.333.858,00 merupakan pengurangan dari pembayaran utang tahun 2015 sebesar Rp7.062.465.153,00 dan koreksi tagihan utang sebesar Rp82.710.000,00 sesuai dengan Adendum pada saat pembayaran.

Penambahan Utang di Tahun 2016 sebesar Rp1.118.663.858,00 telah di review dan di verifikasi oleh bagian Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia.

Daftar rincian Utang Kepada Pihak Ketiga (lihat lampiran pendukung).

*Uang Muka dari  
KPPN  
Rp8.874.678*

#### **C.4.2. Uang Muka dari KPPN**

Saldo uang muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp8.874.678,00 dan Rp510.620,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo uang muka dari KPPN pada tanggal pelaporan disajikan pada Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia.

Uang Muka dari KPPN merupakan kontra akun dari Kas di Bendahara Pengeluaran.

*Utang Jangka  
Pendek Lainnya  
Rp621.065.134*

#### **C.4.1. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp621.065.134,00 dan Rp3.172.178.782,00. Merupakan utang yang harus diselesaikan pembayarannya dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas dimana Utang Jangka Pendek Lainnya ini muncul karena adanya uang pungutan pajak yang belum sempat disetor per tanggal neraca, sisa LS yang belum di setorkan ke Kas Negara per tanggal neraca dan uang lain-lain pada Bendahara Pengeluaran.

*Ekuitas  
Rp25.692.199.866*

#### **C.5. Ekuitas**

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp25.692.199.866,00 dan Rp13.648.349.096,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



*Surplus/(Defisit) dari  
Kegiatan Operasional  
Rp113.776.307.078*

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2016 dan 2015 masing-masing minus Rp113.776.307.078,00 dan minus Rp96.203.101.328,00. Jumlah Tahun 2016 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp113.776.307.078,00.

*Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp0*

#### **D.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan Operasional Ombudsman Republik Indonesia merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk 31 Desember Tahun 2016 dan 31 Desember Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp868.800,00.

*Beban Operasional  
Rp113.776.307.078*

#### **D.1.2 Beban Operasional**

Jumlah Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp113.776.307.078,00 dan Rp96.203.970.128,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel berikut ini:

**TABEL 30.**

Rincian Beban Operasional 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

<b>JENIS BEBAN</b>	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Beban Pegawai	36.308.611.325	28.182.048.995	28,84
Beban Persediaan	1.315.993.171	1.256.324.432	4,75
Beban Barang dan Jasa	33.335.005.749	25.533.870.710	30,55
Beban Pemeliharaan	4.289.176.371	2.960.637.819	44,87
Beban Perjalanan Dinas	33.375.939.340	33.889.913.695	(1,52)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.151.092.882	4.381.174.477	17,57
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	488.240	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>113.776.307.078</b>	<b>96.203.970.128</b>	<b>18,27</b>

*Beban Pegawai*  
Rp36.308.611.325

#### **D.1.2.1 Beban Pegawai**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai untuk 31 Desember Tahun 2016 dan 31 Desember Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp36.308.611.325,00 dan Rp28.182.048.995,00

Rincian Beban Pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**TABEL 31.**

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

<b>JENIS BEBAN</b>	<b>31 Desember TA 2016</b>	<b>31 Desember TA 2015</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	6.491.757.352	5.920.258.943	<b>9,65</b>
Beban Honorarium	11.162.945.040	7.817.994.566	<b>42,79</b>
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	18.657.409.387	14.443.808.852	<b>29,17</b>
<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>36.312.111.779</b>	<b>28.182.062.361</b>	<b>28,85</b>
Pengembalian Beban Pegawai	(3.500.454)	(13.366)	<b>26.089,24</b>
<b>Jumlah Beban Bersih</b>	<b>36.308.611.325</b>	<b>28.182.048.995</b>	<b>22,59</b>

*Beban Persediaan*  
Rp1.315.993.171

#### **D.1.2.2 Beban Persediaan**

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.315.993.171,00 dan Rp1.256.324.432,00. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**TABEL 32.**

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2016 dan 2015

<b>JENIS BEBAN</b>	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
<b>Beban Persediaan Konsumsi</b>	<b>1.315.993.171</b>	<b>1.256.324.432</b>	<b>4,75</b>
<b>Total</b>	<b>1.315.993.171</b>	<b>1.256.324.432</b>	<b>4,75</b>

*Beban Barang dan Jasa  
Rp33.335.005.749*

#### **D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang-Barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa 31 Desember Tahun 2016 dan 31 Desember Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp33.335.005.749,00 dan Rp25.533.870.710,00. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**TABEL 33.**  
Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2016 dan 2015

<b>JENIS BEBAN</b>	<b>31 Desember TA 2016</b>	<b>31 Desember TA 2015</b>	<b>% Naik (Turun)</b>
Beban Keperluan Perkantoran	5.759.909.348	3.989.107.097	44,39
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	633.981.570	0	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	526.420.000	342.270.000	53,80
Beban Bahan	6.031.735.273	162.339.164	3.615,51
Beban Honor Output Kegiatan	1.495.457.500	1.267.727.500	17,96
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.332.141.684	4.234.561.675	(21,31)
Beban Langganan Listrik	1.864.399.241	1.179.120.075	58,12
Beban Langganan Telepon	630.886.197	326.080.456	93,48
Beban Langganan Air	161.688.079	85.529.905	89,04
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	536.793.691	434.986.397	23,40
Beban Jasa Konsultan	20.000.000	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	437.422.503	0
Beban Sewa	8.216.752.691	5.992.852.054	37,11
Beban Jasa Profesi	2.027.143.500	953.447.000	112,61
Beban Jasa Lainnya	2.097.696.975	6.127.570.924	(65,77)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	855.960	0
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>33.335.005.749</b>	<b>25.533.870.710</b>	<b>30,55</b>

*Beban Pemeliharaan  
Rp4.289.176.371*

#### **D.1.2.4 Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.289.176.371,00 dan Rp2.960.637.819,00.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**TABEL 34.**

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

JENIS BEBAN	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.297.813.565	1.238.423.604	85,54
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.977.476.876	1.711.165.312	15,56
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	13.820.930	11.048.903	25,08
Beban Persediaan suku cadang	65.000	0	0
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>	<b>4.289.176.371</b>	<b>2.960.637.819</b>	<b>44,87</b>

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp33.375.939.340*

**D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 33.375.939.340,00 dan Rp33.889.913.695,00. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**TABEL 35.**

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

JENIS BEBAN	30 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	21.142.276.101	31.974.344.818	(33,87)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.229.145.395	1.303.811.000	377,76
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.351.591.706	19.500.000	27.344,06
Beban Perjalanan Luar Negeri	652.926.138	592.257.877	10,24
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>33.375.939.340</b>	<b>33.889.913.695</b>	<b>(0,17)</b>

Beban Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp5.151.092.882

#### D.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.151.092.882,00 dan Rp4.381.174.477,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**TABEL 36.**

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

JENIS BEBAN	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.053.233.444	4.370.268.885	15,62
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.259.647	2.519.294	(50,00)
Beban Amortisasi Software	59.023.558	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan	6.008.660	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	31.567.573	8.386.298	276,41
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>5.151.092.882</b>	<b>4.381.174.477</b>	<b>0,52</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp488.240

#### D.1.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2016 berasal dari Piutang Bukan Pajak atas kelebihan Pembayaran Uang Makan dan Tunjangan Kinerja PNS Ombudsman RI. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp488.240,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**TABEL 37.**

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2016

JENIS BEBAN	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	488.240	0	0
<b>Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>488.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar minus Rp2.259.191.083,00 dan Rp0,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 sebesar minus Rp2.259.191.083,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar minus Rp11.390.068,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.270.581.151,00.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal  
Rp13.648.349.096*

### E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp13.648.349.096,00 dan Rp21.342.977.889,00.

*Surplus/(Defisit) LO  
Rp(111.517.115.995)*

### E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar minus Rp111.517.115.995,00 dan minus Rp96.203.101.328,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

*Koreksi Yang  
Menambah/Mengurangi) Nilai Ekuitas  
(Rp57.146.484)*

### E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar minus Rp57.146.484,00 dan Rp85.013.196,00. Jumlah per 31 Desember 2016 dan 2015 tersebut terdiri atas :

**TABEL 38.**

Rincian Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

URAIAN	31 Des 2016	31 Des 2015
Penyesuaian Nilai Aset	-	(85.013.196)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(57.146.484)	-
<b>TOTAL</b>	<b>(57.146.484)</b>	<b>(85.013.196)</b>

*Penyesuaian Nilai  
Aset Tahun Berjalan  
Rp0*

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp(85.013.196). Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai perolehan persediaan akibat penerapan kebijakan akuntansi, yaitu persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian/perolehan terakhir. Pada tahun 2015, penyesuaian nilai persediaan diakui sebagai koreksi nilai ekuitas, sedangkan pada tahun 2016 diakui sebagai bagian dari surplus/(defisit) LO.

Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non Revaluasi  
Rp(57.146.484)

### E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar minus Rp57.146.484,00 dan Rp0,00.

**TABEL 39.**

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2016

URAIAN	JUMLAH
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	263.609.034
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(320.755.518)
<b>TOTAL</b>	<b>(57.146.484)</b>

Koreksi berasal dari Jurnal Transaksi Mutasi Barang Milik Negara pada aplikasi SIMAK-BMN dan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai perolehan Aset Tak Berwujud yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya, dan koreksi sebagai akibat dari penerapan amortisasi Aset Tak Berwujud.

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp123.618.113.249

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp123.618.113.249,00 dan Rp88.593.485.731,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri atas :

**TABEL 40.**

Rincian Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

URAIAN	31 Des 2016	31 Des 2015
Ditagihkan Ke Entitas Lain	126.143.918.276	88.951.681.409
Diterima dari Entitas Lain	(2.525.805.027)	(265.899.133)
Transfer Keluar	-	(92.296.545)
<b>TOTAL</b>	<b>123.618.113.249</b>	<b>88.593.485.731</b>

Ditagihkan ke Entitas  
Lain  
Rp126.143.918.276

#### E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp126.143.918.276,00 dan Rp88.951.681.409,00. Jumlah per 31 Desember 2016 merupakan realisasi belanja yang telah di terima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2016.



*Diterima dari Entitas  
Lain  
Rp(2.525.805.027)*

#### **E.4.2. Diterima dari Entitas Lain**

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar minus Rp2.525.805.027,00 dan minus Rp265.899.133,00. Jumlah per 31 Desember 2016 merupakan penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu serta temuan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya yang telah di setorkan ke Kas Negara selama tahun 2016.

*Ekuitas Akhir  
Rp25.692.199.866*

#### **E.5. Ekuitas Akhir**

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp25.692.199.866,00 dan Rp13.648.349.096,00. Jumlah per 31 Desember 2016 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp27.696.473.536,00 di kurangi nilai Kewajiban sebesar Rp2.004.273.670,00.

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

Pengungkapan Penting Lain-Lain sebagai berikut :

1. Sampai dengan per 31 Desember 2016 terdapat revisi RKAKL sebanyak lima kali yaitu:
  - Revisi I tanggal 8 Maret 2016
  - Revisi II tanggal 30 Mei 2016
  - Revisi III tanggal 01 Agustus 2016
  - Revisi IV tanggal 20 September 2016
  - Revisi V tanggal 28 November 2016
2. Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas satu satker, yaitu Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (439624) dan menggunakan Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN.
3. Ombudsman Republik Indonesia mengelola satu rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Ombudsman Republik Indonesia di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Harmoni Setneg dengan No. Rekening 96543728.



**OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# **LAMPIRAN**

**LAPORAN  
KEUANGAN  
( AUDITED )  
2016**

---

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**  
 PER DESEMBER 2016  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:17 PM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	43,912,333,724	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	2,525,805,027	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	4,706,425,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	102,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	358,180,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	87,300,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	515,900,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	350,000,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	223,810,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	399,775,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	1,233,787,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	286,858,000
2.0	511332	Allotment Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	732,000,000
2.0	512111	Allotment Belanja Uang Honor Tetap	0	13,051,588,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	79,664,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	20,735,076,000
2.0	512412	Allotment Belanja Pegawai Transito	0	923,708,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	6,199,145,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,398,080,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	546,360,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	10,464,698,000

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**  
 PER DESEMBER 2016  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:17 PM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,874,570,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	5,509,227,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	3,641,715,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	2,202,720,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	862,320,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	375,360,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,104,120,000
2.0	522121	Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro	0	0
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	0
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	10,637,310,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	3,111,550,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	4,204,322,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	2,891,217,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,093,530,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	34,147,383,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	8,348,870,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	9,599,840,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	1,109,348,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	14,778,149,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	272,245,000

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**  
 PER DESEMBER 2016  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:17 PM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,525,777,351
3.0	423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27,676
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,452,397,620	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69,146	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	454
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	235,944,244	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	57,585,588	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	429,190,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	540,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	40,637,034	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	229,539,120	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	880,178,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	242,800,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,960,000
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	732,000,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	11,162,945,040	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	17,946,473,982	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,354,733,462	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	2,616,600
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	629,116,989	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	526,420,000	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**  
 PER DESEMBER 2016  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:17 PM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Belanja Bahan	5,788,631,155	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,470,540,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	89,382,500
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,521,077,184	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,900,329,751	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,864,175,645	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	629,838,489	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	161,678,579	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	535,922,065	0
3.0	522141	Belanja Sewa	9,109,161,785	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,216,758,500	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	9,015,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,905,018,975	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,367,846,040	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,422,963,063	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	23,163,744,885	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	2,021,468,784
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,342,626,600	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	132,931,205
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,909,462,931	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	557,871,225

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**  
PER DESEMBER 2016  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:17 PM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	733,169,206	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	80,243,068
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,820,847,034	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	100,000
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	257,225,000	0
JUMLAH			<b>175,479,185,863</b>	<b>175,479,185,863</b>



**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER DESEMBER 2016**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,706,732	0
0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	6,167,946	0
0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	621,065,134	0
0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	2,883,605,758	0
0	115212	Piutang Lainnya	97,647,995	0
0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	488,240
0	117111	Barang Konsumsi	544,904,636	0
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
0	117114	Suku Cadang	0	0
0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0	131111	Tanah	7,315,400,000	0
0	132111	Peralatan dan Mesin	35,608,495,801	0
0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0	133111	Gedung dan Bangunan	0	0
0	135111	Aset Tetap Renovasi	2,003,807,288	0
0	135121	Aset Tetap Lainnya	48,737,125	0
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	21,882,931,062
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
0	162151	Software	467,059,234	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER DESEMBER 2016**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	961,680,039	0
0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	294,697,400	0
0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	890,294,514
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	187,013,896
0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	198,773,840
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,118,663,858
0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	255,670,000
0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	8,874,678
0	219913	Utang Jangka Pendek Lain-lain	0	616,871,976
0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	4,193,158
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	126,143,918,276
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,525,805,027	0
0	391111	Ekuitas	0	13,648,349,096
0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	263,609,034
0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	320,755,518	0
3	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,525,777,351
3	423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27,676
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	80,599,987

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER DESEMBER 2016**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,452,397,620	0
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	69,146	0
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	235,944,244	0
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	57,585,588	0
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	429,190,000	0
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	40,637,034	0
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	229,539,120	0
3	511129	Beban Uang Makan PNS	803,594,600	0
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	242,800,000	0
3	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	732,000,000	0
3	512111	Beban Uang Honor Tetap	11,162,945,040	0
3	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	17,925,409,387	0
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	5,762,525,948	0
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	633,981,570	0
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	526,420,000	0
3	521211	Beban Bahan	6,031,735,273	0
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,584,840,000	0
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,332,141,684	0
3	522111	Beban Langganan Listrik	1,864,399,241	0
3	522112	Beban Langganan Telepon	630,886,197	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER DESEMBER 2016**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	522113	Beban Langganan Air	161,688,079	0
3	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	536,793,691	0
3	522131	Beban Jasa Konsultan	20,000,000	0
3	522141	Beban Sewa	8,216,752,691	0
3	522151	Beban Jasa Profesi	2,036,158,500	0
3	522191	Beban Jasa Lainnya	2,097,696,975	0
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,297,813,565	0
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,977,476,876	0
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	23,163,744,885	0
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,362,076,600	0
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,909,462,931	0
3	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	733,169,206	0
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,053,233,444	0
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,259,647	0
3	592115	Beban Amortisasi Software	59,023,558	0
3	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6,008,660	0
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	31,567,573	0
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,315,993,171	0
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	13,820,930	0
3	593114	Beban Persediaan suku cadang	65,000	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER DESEMBER 2016**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	335,823,863	0
3	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	488,240	0
3	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	11,390,068	0
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	454
3	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	540,000
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	2,960,000
3	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	2,616,600
3	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	89,382,500
3	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	9,015,000
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	2,021,468,784
3	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	132,931,205
3	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	557,871,225
3	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	80,243,068
JUMLAH			<b>170,723,085,478</b>	<b>170,723,085,478</b>

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.F.W.1  
Tanggal : 23/04/17 11:16 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_face\_kl

NO	URAIAN	2016				2015			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	2,525,805,027	(2,525,805,027)	0	0	265,899,133	(265,899,133)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	2,525,805,027	(2,525,805,027)	0	0	265,899,133	(265,899,133)	0
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	43,684,173,000	36,406,259,320	7,277,913,680	83	32,767,632,000	28,182,048,995	4,585,583,005	86
	BELANJA BARANG	111,321,685,000	76,659,686,922	34,661,998,078	69	94,132,172,000	60,255,348,603	33,876,823,397	64
	BELANJA MODAL	15,050,394,000	13,077,972,034	1,972,421,966	87	9,087,041,000	514,283,811	8,572,757,189	6
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	170,056,252,000	126,143,918,276	43,912,333,724	74	135,986,845,000	88,951,681,409	47,035,163,591	65
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER DESEMBER 2016 DAN 2015**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2017 11:16 PM

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	8,874,678	510,620	8,364,058	1,638.02
Kas Lainnya dan Setara Kas	621,065,134	3,196,569,782	(2,575,504,648)	(80.57)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2,883,605,758	1,537,174,624	1,346,431,134	87.59
Piutang Bukan Pajak	97,647,995	0	97,647,995	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(488,240)	0	(488,240)	0.00
Piutang Bukan Pajak (Netto)	97,159,755	0	97,159,755	0.00
Persediaan	544,904,636	288,908,487	255,996,149	88.61
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>4,155,609,961</b>	<b>5,023,163,513</b>	<b>(867,553,552)</b>	<b>(17.27)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	7,315,400,000	7,315,400,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	35,608,495,801	27,588,772,634	8,019,723,167	29.07
Gedung dan Bangunan	0	118,554,989	(118,554,989)	(100.00)
Aset Tetap Lainnya	2,052,544,413	1,175,083,695	877,460,718	74.67
Akumulasi Penyusutan	(21,882,931,062)	(17,603,446,191)	(4,279,484,871)	24.31
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>23,093,509,152</b>	<b>18,594,365,127</b>	<b>4,499,144,025</b>	<b>24.20</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	467,059,234	261,834,234	205,225,000	78.38
Aset Lain-lain	1,256,377,439	709,926,595	546,450,844	76.97
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(1,276,082,250)	(367,405,818)	(908,676,432)	247.32
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>447,354,423</b>	<b>604,355,011</b>	<b>(157,000,588)</b>	<b>(25.98)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>27,696,473,536</b>	<b>24,221,883,651</b>	<b>3,474,589,885</b>	<b>14.34</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,374,333,858	7,400,845,153	(6,026,511,295)	(81.43)
Uang Muka dari KPPN	8,874,678	510,620	8,364,058	1,638.02
Utang Jangka Pendek Lainnya	621,065,134	3,172,178,782	(2,551,113,648)	(80.42)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>2,004,273,670</b>	<b>10,573,534,555</b>	<b>(8,569,260,885)</b>	<b>(81.04)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>2,004,273,670</b>	<b>10,573,534,555</b>	<b>(8,569,260,885)</b>	<b>(81.04)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	25,692,199,866	13,648,349,096	12,043,850,770	88.24
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>25,692,199,866</b>	<b>13,648,349,096</b>	<b>12,043,850,770</b>	<b>88.24</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>25,692,199,866</b>	<b>13,648,349,096</b>	<b>12,043,850,770</b>	<b>88.24</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>27,696,473,536</b>	<b>24,221,883,651</b>	<b>3,474,589,885</b>	<b>14.34</b>

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LO.KL  
Tanggal : 23/04/17 11:15 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lo\_kl

URAIAN	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	868,800	(868,800)	(100)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	868,800	(868,800)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	868,800	(868,800)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	36,308,611,325	28,182,048,995	8,126,562,330	28.836
Beban Persediaan	1,315,993,171	1,256,324,432	59,668,739	4.749
Beban Barang dan Jasa	33,335,005,749	25,533,870,710	7,801,135,039	30.552
Beban Pemeliharaan	4,289,176,371	2,960,637,819	1,328,538,552	44.873
Beban Perjalanan Dinas	33,375,939,340	33,889,913,695	(513,974,355)	(1.517)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	



LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LO.KL  
Tanggal : 23/04/17 11:15 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lo\_kl

URAIAN	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5,151,092,882	4,381,174,477	769,918,405	17.573
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	488,240	0	488,240	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	113,776,307,078	96,203,970,128	17,572,336,950	18.266
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(113,776,307,078)	(96,203,101,328)	(17,573,205,750)	18.267
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(11,390,068)	0	(11,390,068)	()
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	11,390,068	0	11,390,068	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,270,581,151	0	2,270,581,151	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,606,405,014	0	2,606,405,014	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	335,823,863	0	335,823,863	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	2,259,191,083	0	2,259,191,083	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(111,517,115,995)	(96,203,101,328)	(15,314,014,667)	15.918
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(111,517,115,995)	(96,203,101,328)	(15,314,014,667)	15.918

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT KEMENTERIAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 23/04/17 11:16

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lpe\_kl

URAIAN	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	13,648,349,096	21,342,977,889	(7,694,628,793)	(36.052)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(111,517,115,995)	(96,203,101,328)	(15,314,014,667)	15.918
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(57,146,484)	(85,013,196)	27,866,712	(32.779)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	(85,013,196)	85,013,196	(100)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(57,146,484)	0	(57,146,484)	()
LAIN-LAIN	0	0	0	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	123,618,113,249	88,593,485,731	35,024,627,518	39.534
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	12,043,850,770	(7,694,628,793)	19,738,479,563	(256.523)
EKUITAS AKHIR	25,692,199,866	13,648,349,096	12,043,850,770	88.244



## **BERITA ACARA REKONSILIASI**

Nomor: BAR-209632/WPB.11/KP.182/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2016.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	170,056,252,000	170,056,252,000	0
2	Belanja	129,041,047,112	129,041,047,112	0
3	Pengembalian Belanja	-2,897,128,836	-2,897,128,836	0
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,525,805,027	2,525,805,027	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	8,364,058	8,364,058	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	8,874,678	8,874,678	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono  
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Budiono Widagdo, SH, M.Si  
NIP.195807101983031001

## Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SAU sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2016 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pagu Anggaran

SAU : 170,056,252,000

SAI/SA-BUN : 170,056,252,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

### 2. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

### 3. Laporan Realisasi Belanja

SAU : 129,041,047,112

SAI/SA-BUN : 129,041,047,112

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

### 4. Pengembalian Belanja

SAU : -2,897,128,836

SAI/SA-BUN : -2,897,128,836

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

### 5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SAU : 2,525,805,027

SAI/SA-BUN : 2,525,805,027

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

### 6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

### 7. Pengembalian Pajak

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SAU : 8,364,058

SAI/SA-BUN : 8,364,058

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SAU : 8,874,678

SAI/SA-BUN : 8,874,678

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SAU : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kuasa Pengguna Anggaran

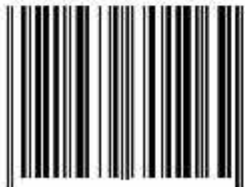
Setiyono  
NIP.197311161996021001



Drs. Budiono Widagdo, SH, M.Si  
NIP.195807101983031001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Ombudsman RI 2017



**JL. HR RASUNA SAID KAV. C19 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN**  
**TELP. (021) 52960907 FAX : (021) 52960907**